KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa kekuatan serta kesehatan lahir dan batin sehingga penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (R-LPPD) ini dapat diselesaikan sebagai bagian dalam rangkaian pelaporan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah.

Penyampaian R-LPPD merupakan kewajiban Kepala Daerah yang didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang muatan dan sistematika pelaporannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan dalam penyusunan laporan ini demi mewujudkan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat yang adil dan prima.

Menyadari akan kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam Laporan ini, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami juga senantiasa menerima dengan tangan terbuka atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak yang dapat menjadi masukan bagi perbaikan ke depan. Akhirnya kami berharap semoga R-LPPD ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat di masa-masa yang akan datang.

Sekian, Wabillahi Taufik Walhidayah.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Pangkajene Sidenreng, Maret 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. SYAHARUDDIN ALRIF

RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2024

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan informasi utama keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada publik dengan muatan informasi sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Adapun capaian kinerja makro pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1	CAPAIAN KINERJA TAHUN N	LAJU KINERJA
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,38	74,81	0,578
2	Angka Kemiskinan	5,14	5,02	(2,335)
3	Angka Pengangguran	3,29	3,02	(8,207)
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,28	4,05	23,476
5	Pendapatan Per kapita	55,51	59,31	6,846
6	Ketimpangan Pendapatan	0,345	0,319	(7,536)

Sumber : BPS Kab. Sidrap Tahun 2024

a) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sesuai tabel diatas, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang mencatat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 IPM Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 74,38. Meningkat di tahun 2024 menjadi 74,81 atau mengalami kenaikan 0,578 persen. IPM Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 ini berstatus tinggi. Kenaikan IPM ini sejalan dengan perbaikan angka harapan hidup, kualitas pendidikan, serta daya beli masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

b) Angka Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam tabel diatas, menunjukkan angka kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang dua tahun terakhir. Pada tahun 2023 angka kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 5,14 persen. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 5,02 persen atau mengalami penurunan sebesar 2,335 persen.

c) Angka Pengangguran

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang, angka pengangguran Kabupaten Sidenreng Rappang dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2023 angka pengangguran di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 3,29 persen. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 3,02 persen atau mengalami penurunan sebesar 8,207 persen.

d) Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang 2 tahun terakhir mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 3,28 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 4,05 persen atau mengalami kenaikan yakni sebesar 23,467 persen.

e) Pendapatan Per Kapita

Pendapatan Perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang Pendapatan Perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 pendapatan perkapita di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 55,51 Juta. Angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2024 yakni sebesar 59,31 Juta. Atau mengalami peningkatan sebesar 6,846 persen.

f) Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Kabupaten Sidenreng Rappang tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2022 tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 0,354. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 0,345. Dan pada tahun 2024, gini ratio Kabupaten Sidenreng Rappang kembali turun menjadi 0,319 atau mengalami penurunan yakni sebesar -7,536 persen

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

A. Capaian Kinerja Outcome

JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2024
PENDIDIKAN		
Pendidikan Anak Usia Dini	8.503	10.134
Pendidikan Dasar	44.130	47.463
Pendidikan Kesetaraan	918	304
KESEHATAN		
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.729	4.262
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.209	4.648
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5.150	4.617

Pelayanan Kesehatan Balita	20.907	20.208
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	50.018	25.429
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	160.625	155.925
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	37.985	34.623
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	24.141	26.857
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.067	4.357
Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	751	761
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.026	6.779
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	7.109	6.626
PEKERJAAN UMUM		
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	76.620	76.674
Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah	73.113	73.404
PERUMAHAN RAKYAT		
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Tidak terjadi bencana	Tidak terjadi bencana
Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	0	0

TRANTIBUMLINMAS		
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10	10
Pelayanan informasi Rawan Bencana	51.567	52.480
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	20	52.480
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korbanbencana	341	352
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	10	132
SOSIAL		
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	15	10
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	10	10
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti	25	25
Rehabilitasi Sosial Dasar tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	10	6
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota	80	400

B. Realisasi Belanja

JENIS LAYANAN DASAR	REALISASI ANGGARAN
a. Pendidikan Anak Usia Dini	9.996.496.564,-
b. Pendidikan Dasar	81.940.650.869,-
c. Pendidikan Kesetaraan	1.637.000.000,-

d. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.422.500,-
e. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	22.700.000,-
f. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	83.098.875,-
g. Pelayanan Kesehatan Balita	16.801.000,-
h. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	17.244.000,-
i. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	22.414.000,-
j. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	20.000.000,-
k. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	17.673.000,-
l. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)	158.724.500,-
m. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	24.999.600,-
n. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TBC)	467.582.900,-
o. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	15.870.000,-
p. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1.007.308.115,-
q. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	3.205.504.285,-
r. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah	200.000.000,-
s. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	0,-
t. Pelayanan Ketentraman dan	0,-

Ketertiban Umum	
u. Pelayanan Informasi Rawan Bencana	52.481,-
v. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0,-
w. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0,-
x. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	3.430.714.850,-
y. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	174.272.597,-
z. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana	193.425.500,-

C. Permasalahan Yang dihadapi

URUSAN	PERMASALAHAN
a. Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • APM SD dan SMP masih rendah, masih terdapat anak putus sekolah, belum maksimalnya tata kelola dana BOS, data Anak tidak sekolah yang belum akurat • Masih rendahnya minat masyarakat yang belum tamat SD/SMP/SMA untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan.
b. Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Ibu hamil memeriksakan kehamilannya setelah umur 12 minggu • Tingginya kasus abortus dan persalinan preterm.

	<ul style="list-style-type: none">• Ibu hamil tidak menetap dan berpindah alamat.• Adanya kasus hamil diluar nikah.• Banyaknya kasus abortus• Sasaran ibu hamil yang berpindah keluar wilayah• Adanya kasus KJDR / lahir mati• Adanya kasus Bayi Lahir Hidup yang tidak sempat di Kunjungan Neonatal sesuai standar kemudian meninggal• D/S Balita ke Posyandu belum mencapai target• Adanya balita yang tidak menetap dan pindah alamat• Kompetensi petugas pelayanan anak sekolah perlu ditingkatkan• Kurangnya Posbindu Kit• Kurangnya Kader Terlatih• Kompetensi petugas pelayanan lansia perlu ditingkatkan• Terbatasnya alat dan bahan yang dipakai dalam pelayanan lansia• Tidak ada buku kesehatan lansia• Kurangnya alat ukur tekanan darah• Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan• Kurangnya strip pemeriksaan DM• Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan• Kurangnya tenaga kesehatan terlatih• Kurangnya kepedulian keluarga, masyarakat dan pemerintah terhadap ODGJ• Pasien ODGJ tidak memiliki biaya dan jaminan kesehatan
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya dukungan lintas program lintas sektor dan masyarakat • Kurangnya dukungan LS (Lintas Sektor)
c. Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran sarana dan prasarana air bersih/minum terkendala dengan adanya Refocusing Dana Alokasi Khusus 2020 dari Kementerian. • Pada umumnya pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih cukup baik, hanya saja untuk pelaksanaan pekerjaan dengan Type pekerjaan Pengeboran dibutuhkan Penyedia Jasa yang memenuhi syarat sehingga peralatan dan metodologi pelaksanaan di lapangan dapat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Selain itu ditemukan juga kepemilikan lahan lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang bermasalah pada saat pelaksanaan sehingga cukup menghambat penyelesaian pekerjaan tepat waktu. • Minimnya pemahaman masyarakat terhadap proses pelaksanaan konstruksi dilapangan sehingga sangat dibutuhkan pula koordinasi yang baik antara pihak OPD Teknis, BPKD dan Pemerintah Desa / Kelurahan sehingga proses pelaksanaan fisik dan keuangan dapat berjalan selaras.
d. Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada hunian korban bencana yang masuk kategori rumah yang yang perlu mendapatkan pelayanan sesuai standar SPM • Tidak ada hunian masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah
e. Ketentraman, Ketertiban Umum,	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya laporan/aduan dari masyarakat yang menjadi sasaran layanan SPM

dan Linmas	<p>ketentraman dan ketertiban umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya dukungan anggaran • Kurangnya dukungan personil • Adanya cuaca ekstrim yang timbul • Kesadaran masyarakat dalam menjaga alam perlu ditingkatkan • Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai bencana perlu dimotivasi • Kesadaran masyarakat membuang sampah dan menebang perlu dimaksimalkan • Keterbatasan pada peralatan, sarana dan prasarana
f. Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya alokasi anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN Tahun 2024 • Minim anggaran yang dialokasikan sehingga penerima bantuan yang disentuh terlalu sedikit • Faktor lingkungan atau lokasi bencana yang sulit dijangkau akibat sulitnya akses ke lokasi bencana karena rusaknya akses jalan menuju ke lokasi bencana.

3. Hasil EPPD dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.7- 6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, nilai EPPD Kabupaten Sidenreng Rappang **3,0785** status **Sedang**. Untuk hasil EPPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, hingga saat ini belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 yaitu **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** untuk yang kedelapan kalinya berturut-turut.

4. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

ANGGARAN (Rp)	REALISASI PENDAPATAN (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)
1.260.439.388.000,00	1,247,492,377,583.80	(12,947,010,416.2)	98.97

Pada Tahun Anggaran 2024, Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp.1.247 Trilyun lebih atau 98,97 persen dari target sebesar Rp.1.260 Trilyun lebih.

ANGGARAN (Rp)	REALISASI PENGELUARAN (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)
1,325,413,077,000,-	1,266,425,018,831.82	(58,988,058,168.2)	95,55

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1,266 Trilyun lebih atau 95,55 persen dari anggaran sebesar Rp. 1,325 Trilyun lebih.

5. Realisasi Penerimaan Menurut Jenis Penerimaan dan Realisasi Pengeluaran Menurut Jenis Pengeluaran, dan Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.

a. Realisasi Penerimaan

Pendapatan Daerah terdiri atas penerimaan yang bersumber dari Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang capaiannya, sebagai berikut:

NO	REALISASI PENERIMAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	Pendapatan Asli Daerah	183,429,202,000,-	184,954,601,357.80,-	1,525,399,357.8
2	Pendapatan Transfer	1,069,580,331,000,-	1,056,467,147,194,-	(13,113,183,806),-
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7,429,855,000,-	6,070,629,032,-	(1,359,225,968)

b. Realisasi Pengeluaran

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1,266 Trilyun lebih atau 95,55 persen dari anggaran sebesar Rp. 1,325 Trilyun lebih. Adapun rincian belanja daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

NO	REALISASI PENGELUARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.	Belanja Operasi	999,581,331,000,-	958,598,105,396.96,-	(40,983,225,603.00)
2.	Belanja Modal	179,755,151,000,-	171,335,441,547.86,-	(8,419,709,452.1)
3.	Belanja Tak Terduga	5,000,000,000,-	2,058,430,500,-	(2,941,569,500)
4.	Transfer	141.076.595.000,-	134.433.041.387,-	(6.643.553.613)

c. Realisasi Pembiayaan

NO	REALISASI PEMBIAYAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	67,248,689,000,-	67,248,687,155.49	100
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2,275,000,000,-	2,274,086,498,-	100

6. Inovasi daerah

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu *tool* dalam mengakselerasi peningkatan daya saing suatu negara dan daerah. Berikut beberapa inovasi yang dikembangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024 :

- Inovasi WIROSABLENG (Puskesmas Empagae DinkesdaldukKB) (terbaik II)
- Inovasi PESAN TOBAT DARI SURGA (Puskesmas Lancirang DinkesdaldukKB) (terbaik II)
- Inovasi CEGAT DENGAN PEKA (RSUD Nene Mallomo DinkesdaldukKB) (terbaik II)
- Inovasi MBAH SIJAKA (RSUD Arifin Nu'mang) (terbaik I)

- Inovasi RUMAH LANGIT (Ruang Masyarakat Khusus Layanan Pendidikan Nonformal Gratis Terintegrasi) diikutkan dalam penilaian penghargaan Pembangunan daerah.